

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KETERTIBAN  
UMUM DAN PERLINDUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN INVESTASI  
(STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

Skripsi

Oleh

**TRI HENDRA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN INVESTASI (Studi pada Kabupaten Lampung Utara)**

**Oleh:**

**Tri Hendra**

Perkembangan investasi suatu daerah setidaknya dipengaruhi oleh kondisi keamanan daerah tersebut serta promosi potensi investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendatangkan investasi di daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan untuk pengembangan investasi.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di Kabupaten Lampung Utara dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data; wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan untuk kejahatan biasa dilakukan dengan bekerjasama dengan kepolisian resor melalui pinjam pakai aset daerah, penambahan pos-pos keamanan dan pengenalan jaminan keamanan, sedangkan pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dilakukan dengan pembentukan Tim Saber Pungli dan menekankan pengurusan perizinan tanpa melalui perantara. Peran pemerintah daerah dalam

pengembangan investasi dilakukan dengan memberikan keringanan pajak, mempermudah proses perizinan serta mengedepankan pengurusan perizinan yang bebas dari praktek korupsi.

**Kata Kunci: Peran pemerintah daerah, jaminan keamanan dan perlindungan, minat investasi**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN ENSURING PUBLIC ORDER AND PROTECTION**

**(Study on Northern Lampung Regency)**

**By:**

**Tri Hendra**

The development of an area's investment is at least influenced by the security conditions of the region and the promotion of investment potentials made by the local government in bringing investment in the region. The purpose of this research is to know the role of local government in ensuring public order and protection for investment development.

This type of research is descriptive qualitative, the research location is in North Lampung regency with purposive sampling technique. This research uses data collection techniques; Interviews, observation and documentation.

The results indicate that the role of local government in ensuring public order and protection for crime is usually done by cooperating with the resort police by borrowing using local assets, adding security posts and introducing security guarantees, whereas white collar crime is done with the formation Tim Saber Pungli and emphasize licensing arrangements without going through intermediaries. The role of local government in the development of investment is done by providing tax relief,

simplify the process of licensing and put forward the licensing arrangement that is free from corrupt practices.

**Key words: The role of local government, security and protection guarantees, investment interest.**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KETERTIBAN UMUM  
DAN PERLINDUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN INVESTASI  
(STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

**Oleh:**

**TRI HENDRA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENJAMIN KETERTIBAN UMUM DAN  
PERLINDUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN  
INVESTASI (STUDI PADA KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA)**

Nama Mahasiswa : **Tri Hendra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1316021083**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP 19580109 198603 1 002

**Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**  
NIP 19830727 200912 1 009

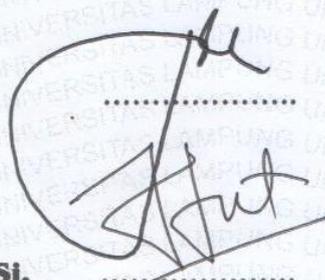
**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

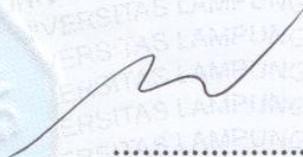
**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.** .....

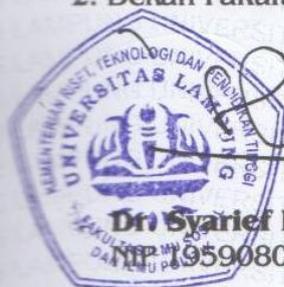


**Sekretaris : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.** .....

**Penguji Utama : Dr. Ari Darmastuti, M.A.** .....



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juli 2017  
Yang Membuat Pernyataan,



Tri Hendra  
NPM. 1316021083

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Talang Jali, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Tanggal 5 Juli 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Thabrani RA dan Ibu Hartati, penulis memulai pendidikan di SDN 1 Wonomerto tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan di SMPN 11 Kotabumi 2005 dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Kotabumi tahun 2011. Selanjutnya penulis sempat bekerja diberbagai tempat selama dua tahun dan melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung. Melalui jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan 2013, Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan Penulis juga telah menjadi Mitra Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, kegiatan yang sudah diikuti diantaranya: Sensus Pertanian 2013, Tim *Entry* Sensus Pertanian 2013, Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, Pemetaan Sensus Ekonomi 2016 dan berbagi jenis kegiatan sensus dan survei lainnya . Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2017 di Desa Tugusari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya kenikmatan itu membuat kita terlena, sedangkan kesulitan  
Membuat kita kuat. Maka dalam hidup lebih baik diuji dengan  
Kesulitan, daripada dilenakan dengan kenikmatan”*

*“Saat mengerjakan suatu hal, mulailah dengan niat yang baik,  
Kedua kerjakan dengan sungguh-sungguh, ketiga sempurnakan  
Dengan restu orang tua”*

*“Kita tidak akan pernah tau indahnyanya di puncak,  
Jika tidak mengalami sulitnya mendaki.  
Maka nikmatilah proses hidup, karena kesulitan saat ini  
Akan indah diceritakan di masa depan.”*

*“Tentang pasangan hidup; jangan terlalu sibuk dan gelisah mencari  
teman hidupmu, Semua sudah ditakdirkan bahkan sebelum kita lahir di dunia ini,  
maka mempersiapkan dan memperbaiki diri jauh lebih baik daripada terlalu  
sibuk mencari.”*

**(Tri Hendra)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahanda dan Ibunda tercita serta kaka-kakaku yang ku sayangi sebagai tanda  
bakti, hormat dan cintaku.  
Terimakasih atas doa dan restu yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan untuk Pengembangan Investasi (Studi pada Kabupaten Lampung Utara)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP, M.Si selaku Pembimbing dua yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ari Darmastuti, M.A selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan, serta penjaga Gedung D; Mas dede dkk.
7. Ibu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Lampung Utara beserta jajaran, Bapak Kapolres Lampung Utara, Kasubbag Sarpras Bag Sumda, Kaur Bin Ops, serta seluruh anggota Kepolisian Resor Lampung Utara yang telah berkenan membantu Penulis dalam hal pemberi informasi wawancara maupun data-data.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Thabrani RA, Ibunda Hartati, Kakanda Riki Herison dan Sapta Hendrika yang telah senantiasa memberi doa, semangat dan dukungan selama ini sehingga Penulis bisa menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua dan keluarga.
9. Spesial untuk Pasukan GEL 48; Irfan tompel, Ardy nya adek-adek, Danni mantan *playboy*, Kalim sang pendaki, Indra *The King of Love*, Restu nya Pooja, Iqbal nya Fina eh Fatia, Rizko *yahwe*, Yones *The Oldman*, Agung *Woles*, Yogi pangeran Fisip, dan Putra YNWA. Semoga kita tetap

berteman sampai maut memisahkan kita ya gaes. Agar pertemanan kita makin erat maka jodohkanlah anak-anak kita nanti.

10. Pasukan R.Corp yang udah bubar; Winda DwiasTUTI Herman, Vivi Alviocinta, Resti *owner pie*, Fina yang banyak cenel, Kenn Kpop dan Vika jenong. Semoga kita tetap berteman dekat ya gaes sampai ketemu jodoh masing-masing.
11. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2013; Novrizal Fahmi, Agung Rahmat, Evan Adyatma, Nendro Syahputra, Rendi Ryandani, Bimo Pandu, Ahmad Ridwan Bhayangkara, Dharma Matrenggana, Rangga, Abdi Nugraha, Anam Alamsyah, Dani Satria, Fahmi Umar, M Ridho, Toto Ariwibowo, Bobby K Barasa, M Ibnu, Rifki Febrihanuddin, Tri Arista, I wayan Irvan, Ariestantia Riski KA, Citra Ayu Narulita, Lusita Anjelina, Riski Atika Sari, Bustanul Haimia, Dwi Titiawati, Ekasyari Yulianita, Hesti Seftia, Ika Khodijah, Rika Muhdayani, Marina Syva, Selviana Fikri, Ipnika Nurfasari, Nadia Maudyna, Maria Cristina, Tiara Dayu P, Cici Afrianita the Dragon, Putri Aprodite, Dormatio Manik, Citra Amalia Yulianti, Ariska Putri Lestari, Anggun Dwi Suryani, Maria Ulfa, M Haykal Archi, Jaka Satria Wibawa.
12. Teman-teman KKN Desa Tugusari; Thiomas Briliyan M, Singgih Trenggono, Abdul Haris, Esther Novianty, Rahmi Eka Putri, Mutya Nivitha. Dua bulan waktu yang singkat untuk kita bersama, susah senang kita lewati. Terima kasih Mama Hen masakan yang super lezat untuk kami, terima kasih teteh teteh atas penyegarannya dipagi hari. Terima

kasih Pak Lurah Tugusari beserta perangkat dan seluruh warga Desa  
Tugusari.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat  
bermanfaat.

Bandar Lampung, 21 Juli 2017

Tri Hendra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	9
2. Kegunaan Praktis .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peran .....	10
B. Teori Peran .....	12
C. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah .....	14
D. Tinjauan Tentang Keamanan .....	15
E. Tinjauan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat .....	17
F. Dimensi Keamanan Dari Kekerasan .....	19
G. Konsep Investasi .....	21
H. Konsep Minat Investasi .....	25
I. Teori-teori Lokasi .....	28
1. Teori Alan M Rugman .....	28
2. Teori lokasi Von Thunen .....	28
3. Teori lokasi Webber .....	29
4. Teori lokasi August Losch .....	30
5. Teori lokasi model gravitasi .....	30
6. Teori pemilihan lokasi kegiatan industri secara Komprehensif .....	30
J. Penelitian Terdahulu .....	31
K. Kerangka Pikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Jenis Data Penelitian .....	39

E. Informan.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Teknik Keabsahan Data .....	45
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kabupaten Lampung Utara .....	49
1. Sejarah Kabupaten Lampung Utara .....	49
2. Lokasi dan luas wilayah .....	53
3. Potensi dan sumber daya alam .....	55
B. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan .....	64
1. Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan .....	64
2. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi .....	66
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Pemerintah daerah dalam Menjamin Ketertiban umum Dan Perlindungan .....	77
1. Peran dalam mencegah dan menangani kejahatan biasa .....	78
2. Peran dalam mencegah dan menangani kejahatan kerah putih ....	82
B. Peran Pemerintah daerah dalam Pengembangan Investasi .....	90
1. Indikator Motivasi .....	91
2. Indikator Interaksi .....	95
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	105
B. Saran .....	106

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel jumlah tindak pidana menurut kepolisian sektor Kabupaten Lampung Utara .....	5
2. Tabel data jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi Menurut klasifikasi Industri di kabupaten Lampung Utara .....	7
3. Tabel indikator kriminalitas .....	19
4. Tabel indikator kekerasan komunal .....	20
5. Tabel indikator kekerasan negara-masyarakat .....	20
6. Tabel penelitian terdahulu .....	32
7. Tabel informan .....	41
8. Tabel sungai dan anak sungai .....	54
9. Tabel realisasi pendapatan .....	82
10. Tabel triangulasi data penelitian .....	88
11. Tabel rekap kasus .....	90
12. Tabel rekap tabel wawancara .....	92
13. Tabel jumlah perusahaan .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik jumlah tindak pidana kasus Kepolisian Daerah Lampung 2012-2015 .....	4
2. Grafik persentase penyelesaian tindak pidana menurut Kepolisian Daerah Lampung 2012-2015.....	4
3. Kerangka Pikir .....	35
4. Logo Kabupaten Lampung Utara .....	51
5. Wawancara kepala DPMPTSP .....	79
6. Keadaan jalan .....	80
7. Jumpa pers Kapolres .....	81
8. Lomba burung kicau .....	104

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Iklim investasi yang stabil dalam perekonomian merupakan harapan bagi pemerintah, masyarakat dan utamanya bagi para investor. Untuk menanamkan modal pada suatu daerah, investor tentunya akan mempertimbangkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi investasi mereka. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor politik, faktor ekonomi dan faktor hukum. Faktor hukum sangatlah penting, mengingat faktor ini berkaitan erat dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu daerah bagi penanaman modal. Melalui sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi penanaman modal.

Stabilitas keamanan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Kesuksesan pembangunan yang digalakkan oleh setiap negara sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Peran aktif dan dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan akan optimal jika kriminalitas bisa ditekan serendah-

rendahnya. Berbagai kerugian telah banyak ditimbulkan oleh adanya tindak kriminal, baik itu kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis. Ketidakstabilan ekonomi, pada kondisi banyaknya perusahaan yang menghadapi masalah keuangan bahkan kebangkrutan, akan membawa masalah bagi pemerintahan. Banyaknya pengangguran mengakibatkan masalah sosial hingga bisa memicu kestabilan jalannya pemerintahan daerah.

Biaya yang dikeluarkan oleh korban meliputi nilai properti yang hilang, biaya pengobatan untuk kecelakaan, *opportunity cost* dari waktu kerja yang hilang, rasa sakit dan penderitaan, serta berkurangnya nilai kehidupan. Bagi warga masyarakat kriminalitas akan menimbulkan biaya untuk langkah-langkah pencegahan tindakan kriminal, termasuk alat kelengkapan keamanan dan biaya pengamanan. Bagi suatu negara dengan adanya kriminalitas tentunya akan menimbulkan biaya untuk sistem peradilan meliputi biaya polisi, pengadilan, penahanan, pemenjaraan dan juga untuk perbaikan fasilitas. Salah satu kesalahan dalam membangun tatanan masyarakat adalah ketimpangan sistem ekonomi, yang dibangun tanpa pilar normatif yang berujung pada masalah keadilan.

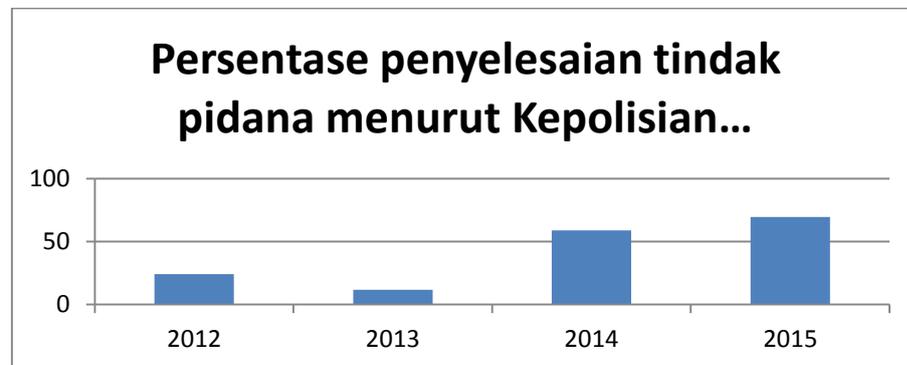
Suatu daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi menanggung *opportunity cost* berupa penurunan minat investasi atau peluang usaha akibat tingginya tingkat kriminalitas. Warga masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi menanggung *opportunity cost* dari berkurangnya aktivitas bebas akibat adanya ketakutan terhadap kejahatan.

Bagi kalangan dunia usaha, jika tingkat kriminalitas di suatu daerah tinggi, maka biaya keamanan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin tinggi, selain untuk menjaga keamanan barang-barang properti perusahaan juga untuk menjaga keamanan pekerja atau pegawai perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan produk yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih mahal, sehingga akan menimbulkan *opportunity cost* akibat menurunnya permintaan produk karena harga penawaran suatu produk lebih tinggi.

Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:”..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia .....”. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilihat pada Gambar 1, dari tahun 2012-2015 jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Daerah Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa persentase penyelesaian tindak pidana menurut Kepolisian daerah Lampung masih minim data dari tahun 2012-2015.



Gambar 1. Grafik perkembangan jumlah tindak pidana kasus di Provinsi Lampung  
 Sumber: BPS RI



Gambar 2. Grafik Persentase penyelesaian tindak pidana menurut Kepolisian Daerah Lampung  
 Sumber: BPS RI

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada rentang waktu 29 oktober 2016 sampai 2 November 2016 diketahui bahwa para pelaku usaha di Kabupaten Lampung Utara mengeluhkan kondisi keamanan yang dinilai kurang kondusif, sehingga mengusik kenyamanan dan pengembangan usaha yang mereka jalankan. Pelaku usaha di Lampung Utara berharap pemerintah daerah dan jajarannya bersama aparat keamanan dapat segera mengatasi berbagai permasalahan khususnya kondisi keamanan, sehingga iklim usaha semakin baik, kompetitif dan produktif.

Pelaku usaha mengeluhkan maraknya aksi perampasan paksa (pembegalan) sepeda motor, pemalakan, pemerasan maupun tindak kriminalitas yang kerap dialami saat menjalankan usaha mereka, sehingga timbul rasa ketidaknyamanan dan ketakutan dalam mengembangkan usaha yang ditekuninya. Menurut para pelaku usaha hal yang penting diperlukan para pelaku usaha itu adalah keamanan, kenyamanan, dan kepastian berusaha tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Karena kepastian keamanan mempengaruhi besaran yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha.

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Lampung Utara tergolong cukup tinggi, meskipun fluktuatif akan tetapi relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data jumlah tindak pidana menurut Kepolisian sektor di Kabupaten Lampung Utara rentang tahun 2013-2015:

**Tabel 1. Jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Lampung Utara pada rentang tahun 2013-2015:**

No (1)	Kepolisian Sektor (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)
1	Polres	653	742	930
2	Polsek Kotabumi Utara	69	40	28
3	Polsek Kotabumi Selatan	53	49	51
4	Polsek Abung Timur	28	35	33
5	Polsek Abung Semuli	7	9	13
6	Polsek Sungkai Selatan	68	74	75
7	Polsek Sungkai Utara	25	36	23
8	Polsek Abung Barat	31	17	30
9	Polsek Bukit Kemuning	59	92	77
10	Polsek Tanjung Raja	3	8	9
11	Polsek Abung Tengah	6	1	5

*Sumber: Mapolres Lampung Utara*

Menurunkan tingkat kriminalitas bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan meningkatkan kekuatan kepolisian, maupun dengan penegakkan sanksi atau hukuman yang tegas berupa penjara dan/atau denda. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, salah satunya melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut UUD 1945 Perubahan Kedua Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pihak pertama yang sangat was-was dengan tingginya tingkat kriminalitas saat ini adalah kelompok investor atau para pengusaha. Mereka akan sulit bekerja dengan maksimal dengan stabilitas keamanan yang kacau. Mereka tentu akan mengambil langkah terhadap apa yang akan terjadi pada usahanya, dapat dengan menarik diri atau batal berinvestasi bagi para pengusaha yang berencana akan menanamkan modalnya.

Terdapat tiga kategori yang harus dipahami dalam manajemen pemerintahan daerah, pertama lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. Kedua lingkungan di dalam pemerintahan, dan ketiga lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Sifat manusia untuk mempertahankan hidup menjadi alasan yang kuat bagi setiap orang untuk melakukan apapun demi hal tersebut, termasuk melakukan tindak kriminalitas. Kemiskinan yang melanda seseorang ternyata sangat mempengaruhi dalam mempertahankan kehidupan.

Pemerintah daerah harus melihat ini secara komprehensif. Namun selama ini pemerintah daerah terlalu pasif menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Guna menciptakan masyarakat yang aman dan menekan tindak kriminalitas, diperlukan kebijakan yang cepat dan strategis. Meningkatkan kemandirian yang jauh dari tindak kriminalitas harus diatasi dengan meningkatkan kesejahteraan dan pola pikir masyarakat. Perilaku para pelaku ekonomi utama di daerah, khususnya pengusaha-pengusaha baik nasional atau asing dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan dengan cara berusaha di sektor-sektor potensial di daerah, antara lain di sektor pertanian dan industri. Mereka inilah yang selanjutnya menjadi motor penggerak (*prime mover*) perekonomian di daerah melalui kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukannya. Berikut data mengenai jumlah perusahaan, tenaga kerja dan nilai produksi menurut klasifikasi industri di Kabupaten Lampung Utara:

**Tabel 2. Data jumlah perusahaan, tenaga kerja dan nilai produksi menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014:**

No (1)	Klasifikasi Industri (2)	Perusahaan (3)	Tenaga Kerja (4)	Nilai Produksi (5)
1	CPO(minyaksawit)	1	250	512 116 056
2	Tepung tapioca	6	863	239 898 016
3	Gula pasir	1	1229	693 285 200
4	Kayu Lapis	1	125	10 643 325
5	Kertas	1	86	17 593 791
6	Ethanol	1	171	213 440 854
7	Meubeller	1	66	5 183 500

Sumber: BPS Lampung Utara

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakannya kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan terhadap pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini dapat dilihat dari minimnya nilai investasi di Kabupaten Lampung Utara jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Mengenai kajian ini dapat disadari bahwa jaminan ketertiban umum dan perlindungan mempunyai hubungan langsung terhadap jalannya perekonomian suatu daerah. Demikian timbul kesadaran akan pentingnya jaminan ketertiban umum dan perlindungan ditengah kehidupan perekonomian di daerah. Birokrasi yang bersih, kesiap-siagaan kepolisian, partisipasi masyarakat, serta kebijakan strategis perlu ditingkatkan untuk dapat menekan tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian adalah bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan terhadap pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan terhadap pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Utara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian serta khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian mengenai pemerintahan daerah
- b. Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan ilmu mengenai studi pemerintahan di daerah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah sebagai gambaran umum guna pengambilan kebijakan strategis di bidang keamanan dan ekonomi.
- b. Sebagai saran bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengenai pentingnya aspek keamanan guna menciptakan iklim investasi yang baik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Peran**

Menurut Biddle dalam Suhardono (1994), berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial” Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian Menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi tiga yaitu: peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. “*Role, personality, and social structure*” karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya.

Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peranan tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan

tergantung dari besartidaknya peran yang diberikan. Pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya tentunya memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda dalam melaksanakan peran.

## B. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayanimasyarakat, sehingga

- pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
  5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Arimbi dan Santosa, 2003).

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "*life-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

"Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam *terminology* aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)".

Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Sarwono di atas seseorang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang atau organisasi tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Lebih lanjut peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai

pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warganya termasuk mengenai jaminan keamanan dan ketertiban.

### **C. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah**

Pengertian Pemerintah adalah Badan Eksekutif mulai dari Kepala Pemerintahan (Presiden atau Perdana Menteri) beserta pembantunya, Menteri-menteri dan seterusnya. Pengertian di atas merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan pihak-pihak lain terutama dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Atas dasar inilah pemerintah membentuk suatu perwakilannya di daerah yang lebih kita kenal dengan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12:

“Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
5. Sosial”.

Pemerintah disini diartikan sebagai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pemerintah membagi daerah menjadi tiga bagian, yakni daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ketiga daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Dalam melaksanakan kegiatannya Pemerintah Daerah dibantu oleh Badan Legislatif Daerah yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wadah untuk melaksanakan azas demokrasi berdasarkan Pancasila.

#### **D. Tinjauan tentang Keamanan**

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap *hacker* atau *cracker*, keamanan rumah terhadap pencuri dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Pengklasifikasian keamanan memiliki banyak literatur analisis dan pengkategorian keamanan. Bagian penting dari keamanan adalah "titik terlemah dalam rantai". Situasinya juga berbeda karena pelindung harus mencakup semua titik serangan sedangkan penyerang hanya harus mengidentifikasi satu titik lemah dan berkonsentrasi di situ. "*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*" (Buzan, 1991:4).

Dari definisi yang telah disebutkan tersebut dapat dilihat bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Ada beberapa ciri-ciri kejahatan bisnis diantaranya, (Dhaniswara, 2006:139);

1. Kejahatan kerah putih, menunjukkan sekumpulan tindak pidana oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi.
2. Kejahatan jabatan, kejahatan yang dilakukan individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka.
3. Kejahatan yang diorganisasi, kejahatan ini sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan.

Seperti halnya pernyataan dari penganut teori Karl Marx;

“pemerintah tak cepat melihat anak yang terlantar kelak akan menjadi penjahat, makanya tenang-tenang saja. Dibuatnya rumah penjara untuk mereka, padahal apabila hati-hati saja sebenarnya dapat dicegah sebelumnya. Mahkamah dan menteri kehakiman goyang kaki saja kalau anak-anak belum dimatangkan jadi penjahat dewasa. Mereka dijebloskan kedalam penjara atau digantung. Padahal mereka apabila dipengaruhi secara bijaksana dari dahulu mungkin besar jasanya bagi masyarakat”(Simadjuntak, 1981:232).

Prasyarat dalam proses penyelenggaraan daerah yang berpihak pada rakyat ialah faktor keamanan, dalam situasi keamanan yang tidak stabil maka pemerintah daerah akan sulit menjalankan fungsi-fungsi hidup berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus hadir dalam penanganan tindak kejahatan, secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut (Simadjuntak, 1981:70). Faktor hukum berkaitan erat dengan perlindungan hukum yang berikan suatu negara atau daerah bagi kegiatan investasi.

## E. Tinjauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko. Pendapat Lemaire (1970) yang dikutip Salam, tentang fungsi pemerintahan, yang oleh Joko Soetono (2002) disebut sebagai Pancapraja adalah: 1) Fungsi *Bestuurzorg* melaksanakan kesejahteraan umum, 2) Fungsi *Bestuur* menjalankan Undang-undang, 3) Fungsi Kepolisian, 4) Fungsi mengadili, 5) Fungsi membuat peraturan (Istianto, 2011:24).

Keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan perasaan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun *psychis*
- b. Adanya kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya
- d. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan batiniah.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Organisasi yang mapan dapat belajar dari berbagai situasi konflik yang dihadapi, dari pembelajaran tersebut prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik dikembangkan. Karena jika tidak dikembangkan dengan baik masalah keamanan dapat menyebabkan disfungsional organisasi (Wirawan, 2009:133).

#### **F. Dimensi Keamanan dari Kekerasan**

Kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok maupun komunitas, yang berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, dan lain sebagainya. Dimensi keamanan dari kekerasan merujuk pada kekerasan langsung, yaitu penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa. Dimensi ini terdiri dari indikator kriminalitas, indikator kekerasan komunal dan indikator kekerasan negara-masyarakat. Dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Indikator kriminalitas**

Merupakan tindakan kejahatan yang disertai dengan kekerasan (pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan perdagangan orang).

**Tabel 3. Indikator Kriminalitas**

Variabel (1)	Justifikasi (2)	Sumber (3)
Jumlah kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir	Jenis kejahatan yang termasuk dalam variabel ini merupakan tindak pidana (sesuai dengan KUHP) disertai dengan kekerasan yang mempunyai dampak buruk secara langsung (hingga hilangnya nyawa) kepada manusia	BPS- PODES
Jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir		
Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesucilaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir		
Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir		

Sumber: Indeks Keamanan Manusia Indonesia

## 2. Indikator kekerasan komunal

Merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintergrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (sesuai dengan UU no 7 tahun 2012). UNSFIR (*United Nations Support Facility for Indonesian Recovery*) mendefinisikan kekerasan komunal sebagai kekerasansosial yang terjadi antara dua kelompok masyarakat/komunal atau bisa berupa satu kelompok diserang oleh kelompok lain. Pengelompokan komunal tersebut bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung, dan lain-lain.

**Tabel 4. Indikator kekerasan komunal**

Variabel (1)	Justifikasi (2)	Sumber Data (3)
Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama	Salah satu bentuk peringatan dini dan pemetaan daerah yang rentan atau rawan terjadinya konflik komunal	BPS-PODES
Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama		

Sumber: Indeks Keamanan Manusia Indonesia

### 3. Indikator kekerasan negara-masyarakat

Merupakan kekerasan antar Negara (*state*) dan masyarakat yang sedang mengekspresikan protes dan ketidakpuasaan mereka kepada institusi negara tanpa motif separatisme. Masyarakat yang melakukan aksi/protes telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi masih tetap mendapatkan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dan/atau aparat pemerintah hingga mengakibatkan korban luka-luka dan/atau meninggal dunia.

**Tabel5. Indikator kekerasan negara-masyarakat**

Variabel (1)	Justifikasi (2)	Sumber (3)
Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintahan yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi, ketidakpuasaan atas kebijakan atau pelayanan	Warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik yang mungkin untuk dilakukan oleh aparat keamanan dan/atau aparat pemerintah tanpa disertai dan dilandasi oleh proses hokum yang berlaku	BPS-PODES
Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat		

keamanan dan aparat pemerintahan yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi, ketidakpuasaan atas kebijakan atau pelayanan		
--	--	--

Sumber: Indeks Keamanan Manusia Indonesia

Pencacahan PODES (Potensi Desa) dilakukan terhadap seluruh desa atau kelurahan diseluruh Indonesia. Pengumpulan data PODES dilakukan dengan sensus (*complete enumeration*). Pencacahan dilakukan melalui wawancara oleh Petugas Pencacah Lapangan (PCL) terhadap kepala Desa/Lurah atau staf yang ditunjuk.

### G. Konsep Investasi

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu di antaranya adalah investasi dalam bentuk saham. Pemodal atau investor dapat menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan utama investor dalam menanamkan dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (*return*) baik berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (*capital gain*).

Sunariyah (2003:4)mendefinisikan investasi sebagai berikut: “Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktivayang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapanmendapatkan

keuntungan di masa-masa yang akan datang”. Sedangkan definisi investasi menurut Taswan dan Soliha (2002:168) adalah sebagai berikut:

“Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia semata-mata mengutamakan pembangunan institusi pasar untuk mengejar pertumbuhan, investasi, industrialisasi dan percepatan dinamika ekonomi tanpa diikuti oleh pengembangan institusi nonekonomi.

### 1. Jenis Investasi

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2004:4) investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu:

- a. Investasi dalam bentuk aktiva riil (*real asset*) berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan *real estate*.
- b. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (*financial asset*) berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:

### 1. Investasi langsung (*direct investment*)

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah *gopublic* dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen dan *capital gains*.

### 2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Investasi tidak langsung (*indirect investment*) terjadi bilamana surat-suratberharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi(*investment company*) yang berfungsi sebagai perantara.

## 2. Risiko Investasi

Dalam berinvestasi seseorang di hadapkan pada suatu risiko yang dinamakanrisiko investasi, sehingga dalam melakukan investasi seseorang harus selalumempertimbangkan tingkat risiko yang di jabarkan oleh Tandelilin (2001:46),sebagai berikut:

“Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara *return actual* dengan *return* yang di harapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut”.

Adapun jenis-jenis risiko yang mungkin di hadapi oleh para investor dalammelakukan kegiatan investasi diantaranya:

1. *Business Risk*  
Kemungkinan kerugian yang di derita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. *Business Risk* ini berkaitan dengan cakupan usaha perusahaan.
2. *Financial Risk*  
Risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatannya misalnya: penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan.
3. *Liquidity Risk*  
Adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada di pasar sekunder.
4. *Exchange Risk*  
Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negaranya.
5. *Country Risk*  
Risiko ini berkaitan dengan kestabilan politik serta kondisi lingkungan perekonomian di suatu Negara.

Keberadaan perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti: polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, dan sebagainya. (Nor Hadi, 2011:1)

Adapun risiko yang harus di hadapi dalam setiap keputusan investasi mengharuskan investor untuk berhati-hati dan melakukan analisa serta pertimbangan yang matang. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan membantu investor dalam mempertimbangkan suatu alternatif investasi. Karena itu seorang investor atau pelaku investasi yang akan berinvestasi sebaiknya memiliki pemahaman mengenai risiko investasi. Pemilihan lokasi dalam analisis teknis manajemen merupakan unsur utama yang menjadi sorotan, karena mengenai lokasi investasi yang akan digunakan. Kesalahan dalam pemilihan lokasi banyak membawa implikasi negatif dari proses keseluruhan (Iban, 2003:84).

## H. Konsep Minat Investasi

Minat merupakan bentuk sikap seseorang berupa rasa lebih suka dan rasa keterikatan terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Pengertian minat menurut Slameto (1995:23) dalam Marpaung (2010) adalah bentuk penerimaan akan suatu hubungan antara diri seseorang dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Maka dapat disimpulkan bahwa minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian sebagai akibat rangsangan atau adanya suatu hal yang menarik.

Menurut Semiawan (1986:120) dalam Marpaung (2010) minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarahkan kepada suatu objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya (*satisfiers*). Definisi ini menjelaskan bahwa minat berfungsi sebagai penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan kegiatan tertentu yang spesifik. Motivasi adalah sumber untuk mempertahankan minat terhadap kegiatan dan menjadikan kegiatan menjadi menyenangkan (*excitement*). Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu melakukan kegiatan yang dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk suatu kebiasaan seseorang.

Minat dan motivasi memiliki hubungan dengan segi kognisi, namun minat lebih dekat dengan perilaku. Memperhatikan kembali definisi minat yang disampaikan semiawan diatas minat sebagai hasil tindakan yang memberi kepuasan (*satisfiers*). Hal ini mengandung arti minat tidak hanya memiliki dimensi aspek afektif, tetapi juga aspek kognitif (Harlock, 1992:116) dalam

Marpaung (2010). Aspek kognitif didasarkan atas konsep atau pengetahuan yang dikembangkan anak mengenai bidang yang berkaitan dengan minat.

Dorongan yang ada pada diri individu, menggambarkan perlunya perlakuan yang luas, sehingga ciri-ciri terlihat lebih terinci dan jelas sesuai dengan faktor kebutuhan. Oleh karena itu ciri-ciri dan minat seseorang akan menjadi pedoman penyelenggara program aktivitas dalam berinvestasi dan arahnya akan lebih dikategorikan kepada hasil investasi berupa: tingkat pengembalian yang besar, aman, terpercaya, dan domain yang lain. Dengan adanya penggunaan pedoman maka pandangan dan pengembangan program akan sesuai dengan ketepatan masa berinvestasi dalam melakukan aktivitas investasi. Kemudian diharapkan akan muncul dalam pikiran, bahwa pada umumnya seseorang memiliki ragam tentang pengertian berinvestasi sehat dan aman yang perlu diperhatikan.

Terdapat dua indikator utama dalam mengukur minat investasi, pertama adalah indikator motivasi dan kedua indikator interaksi. Indikator motivasi berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi seseorang atau badan usaha memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan investasi, seperti potensi investasi suatu daerah baik dari sumber daya, tenaga kerja, pangsa pasar serta jaminan keamanan. Sedangkan indikator interaksi tercipta dari adanya pola-pola interaksi antara seseorang atau badan usaha dengan pihak yang menawarkan investasi. Sehingga pada indikator interaksi sangat ditentukan oleh pihak yang menawarkan investasi apakah cakap dalam melakukan komunikasi dan interaksi dengan baik.

Dari dua konsep diatas peneliti menyimpulkan bahwa indikator motivasiberasal dari internal seseorang atau badan usaha dalam melakukan penilaian terhadap lokasi investasi, penilaian cenderung hasil dari pengamatan riil dilapangan. Sedangkan indikator interaksi berasal dari eksternal seseorang atau badan usaha dalam melakukan penilaian terhadap lokasi investasi, disini peran pihak yang menawarkan (dapat dikatakan pemerintah daerah) sangat menentukan apakah investasi akan berjalan atau tidak. Dengan strategi pola interaksi yang baik, seperti pengenalan potensi investasi, jaminan keamanan dan perizinan yang efektif dan efisien

#### **I. Teori-teori Lokasi**

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Beberapa teori lokasi diantaranya sebagai berikut Tarigan (2005):

## **1. Teori Alan M Rugman**

Teori ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Investasi dipengaruhi oleh dua variabel, yakni variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian yaitu ekonomi, non ekonomi dan pemerintahan. Variabel ekonomi berupa tenaga kerja, modal, teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen. Variabel non ekonomi meliputi politik, sosial dan budaya sedangkan variabel pemerintahan meliputi peraturan dan kebijakan pemerintah daerah. Variabel internalisasi atau Keunggulan Spesifik Perusahaan (KSP), merupakan keunggulan internal yang dimiliki perusahaan multinasional.

## **2. Teori lokasi Von Thunen**

Mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan (pertimbangan ekonomi). Menurut Von Thunen tingkat sewa lahan adalah paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan. Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, makin besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat ke pusat pasar.

Hasilnya adalah suatu pola penggunaan lahan berupa diagram cincin. Perkembangan dari teori Von Thunen adalah selain harga lahan tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin jauh dari pusat kota.

### 3. Teori lokasi Webber

Menganalisis tentang lokasi kegiatan industri. Menurut teori Weber pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deglomerasi.

Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau *locational triangle* untuk memperoleh lokasi optimum. Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM), sedangkan biaya tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lokasi industri dijelaskan Weber dengan menggunakan sebuah kurva tertutup (*closed curve*) berupa lingkaran yang dinamakan *isodapan* (*isodapane*).

#### **4. Teori lokasi August Losch**

Teori Lokasi dari August Losch melihat persoalan dari sisi permintaan (pasar), berbeda dengan Weber yang melihat persoalan dari sisi penawaran (produksi). Losch menyatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Losch cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar.

#### **5. Teori lokasi model gravitasi**

Ada kegiatan yang harus berada disuatu lokasi tanpa ada pilihan lain, misalnya apabila kegiatan tersebut terkait dengan potensi alam, seperti pertambangan, daerah pariwisata, olahraga ski (salju), pengolahan hutan, perkebunan tembakau, dan pelabuhan laut. Ada lokasi kegiatan yang walaupun hasil kreasi manusia telah berada ditempat tersebut sejak dahulu kala sehingga keberadaannya sudah merupakan suatu *given*. Namun berbagai kegiatan yang kemudian muncul dapat dianalisis mengapa kegiatan itu memilih lokasi ditempat tersebut. Salah satu alat analisis yang memungkinkan menjelaskan keberadaan kegiatan pada lokasi tersebut adalah model gravitasi.

## **6. Teori pemilihan lokasi kegiatan industri secara komprehensif**

Tidak ada sebuah teori tunggal yang bisa menetapkan dimana lokasi suatu kegiatan produksi (industri) itu sebaiknya dipilih. Untuk menetapkan lokasi suatu industri secara komprehensif, diperlukan gabungan dari berbagai pengetahuan dan disiplin. Mereka lebih memilih kelangsungan usaha dalam jangka panjang ketimbang laba yang besar tetapi tidak terdapat kepastian berusaha dalam jangka panjang. Dalam memilih provinsi/kabupaten/kota mana, perlu diperhatikan perbedaan kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap kegiatan usaha. Setelah berlakunya otonomi daerah, kebijakan pajak dan retribusi daerah bisa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Begitupun mungkin terdapat perbedaan kondisi keamanan dan sikap masyarakat yang berbeda terhadap investor luar antar satu daerah dengan daerah lainnya. Ada daerah yang masyarakatnya memiliki kecemburuan sosial yang tinggi terhadap investor dari luar dan ini sangat berbahaya terhadap kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Sampai tingkat pemilihan lokasi maka prinsip utama yang dipakai adalah prinsip ekonomi dan kelangsungan usaha dalam jangka panjang (politik dan keamanan).

## J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan telah menjadi inspirasi penelitian ini, sebagai referensi dalam melakukan penelitian, pencarian data serta melakukan analisis.

**Tabel 6. Penelitian terdahulu**

No (1)	Peneliti (2)	Tahun (3)	Jenis (4)	Judul Penelitian (5)
1	Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M Makmur	2015	Jurnal	Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah
2	Fransiska Novita	2013	Jurnal	<i>White collar crime</i> dan masyarakat
3	Nugroho SBM	2008	Jurnal	Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia dan Implikasi kebijakannya
4	Muhammad Zaenuddin	2009	Jurnal	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMA di Batam

Sumber: Diolah peneliti

Peneliti terdahulu yang pertama fokus pada peran pemerintah daerah secara umum dalam perencanaan pembangunan sedangkan peneliti akan lebih menganalisis faktor peran pemerintah daerah pada keamanan dan ketertiban. Penelitian terdahulu yang kedua meneliti fenomena *white collar crime* sebagai kajian utama sedangkan peneliti menempatkan *white collar crime* hanya sebagai salah satu kajian untuk menganalisis mengenai keamanan.

Penelitian terdahulu yang ketiga dan keempat relatif sama yakni menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi ataupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari berbagai aspek dan sangat kompleks.

Mencakup faktor ekonomi maupun non ekonomi, yang berkesimpulan bahwa variabel *maintenance fee* (biaya pemeliharaan), tenaga kerja dan ekspor secara statistik signifikan mempengaruhi investasi. Perbedaannya dengan peneliti adalah, peneliti lebih berfokus pada faktor keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi pengembangan investasi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik wilayah atau lokasi penelitian.

## **K. Kerangka Pikir**

Salah satu aspek sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi (penanaman modal). Aktivitas investasi di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman baru, sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (Jeddawi, 2005:8).

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran investasi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah, masalah perimbangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting.

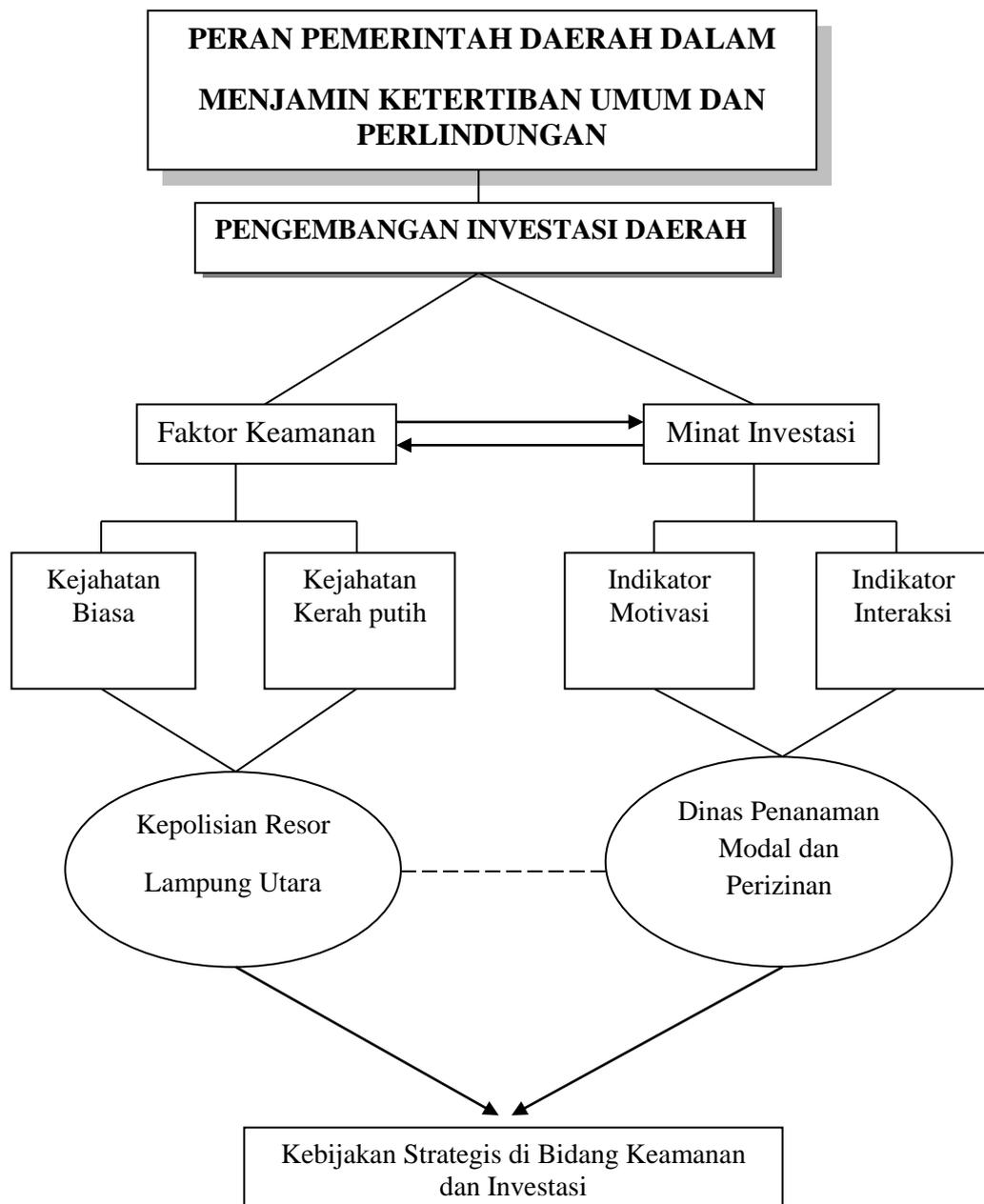
Akan tetapi pemerintah daerah menemui beberapa kendala dalam upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik guna menunjang kemajuan

daerah. Peneliti akan mengkaji peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan terhadap pengembangan minat investasi daerah di Kabupaten Lampung Utara. Peneliti akan menggunakan dua jenis klasifikasi kejahatan dalam menganalisis faktor keamanan, yakni kejahatan biasa dan kejahatan kerah putih atau biasa disebut "*white collar crime*". Serta dua indikator dalam menganalisis minat investasi yakni faktor motivasi dan faktor interaksi.

Merujuk kebijakan pemerintah daerah selama ini dalam hal penanganan keamanan dan upaya mendorong sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di Kabupaten Lampung Utara. Peneliti beranggapan bahwa faktor keamanan dan minat investasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, faktor keamanan yang buruk dapat menimbulkan minat investasi yang minim sedangkan minat investasi yang minim menyebabkan terjadinya kemiskinan, pendapatan perkapita yang rendah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak kriminalitas yang tinggi.

Pada teori Alan M Rugman peneliti akan berfokus pada variabel non ekonomi yakni sosial (keamanan) yang berindikator pada indikator kriminalitas, indikator kekerasan komunal serta indikator negara-masyarakat. Merujuk pada kondisi keamanan di Kabupaten Lampung Utara peneliti akan menggunakan kriminalitas, yang mencakup berbagai tindakan seseorang atau individu yang melanggar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang mencakup kejahatan biasa dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Analisis dengan menggunakan teori dan indikator tersebut maka diharapkan akan adanya upaya

dari pemerintah daerah untuk mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban melalui kebijakan strategis sehingga berpengaruh langsung terhadap pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Utara.



Gambar 3. Alur kerangka pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menelaah mengenai peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan yang berkaitan dengan pengembangan investasi daerah di Kabupaten Lampung Utara, komponen apa saja dalam ketertiban umum dan perlindungan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan investasi. Oleh karena itu, setelah menyusun kerangka pikir, peneliti akan menentukan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Tujuan penulisan pada bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Metode penelitian dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk menggambarkan peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan guna meningkatkan minat investasi di wilayahnya sehingga tergolong sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

Patton (1980), mengatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif dilakukan peneliti, apabila peneliti itu bermaksud akan mengungkap beberapa hal pokok berikut:

1. Memahami makna tertentu (*meaning* baik mengenai *emic* maupun *etic*). Dalam hal ini pengertian *meaning* mencakup aspek *emic* dan *etic* tentang *kognesi*, *afeksi*, *intentions* atau hal-hal lain yang dimaksud peneliti sebagai perspektif partisipan.
2. Memahami konteks tertentu, partisipannya melakukan berbagai tindakan dan memahami pengaruh dari konteks tertentu itu terhadap tindakan-tindakan mereka (partisipasi).
3. Mengidentifikasi gejala dan pengaruh yang tidak terantisipasi sebelumnya (*unanticipated phenomena*), untuk membuat pemahaman baru dalam rangka pengembangan teori atau kajian akademik. Diperlukan eksplorasi studi kualitatif untuk mengungkap gejala sosial melalui informan dalam rangka melihat kecenderungan (*regularities*).
4. Memahami proses tentang terjadinya pelbagai peristiwa, gejala dan tindakan karena studi kualitatif itu bukan saja menarik dalam hal hasil, tetapi juga menarik dalam hal proses yang mengarah kepada terjadinya hasil.
5. Membangun penjelasan kausal walau substansinya berbeda dengan penelitian kuantitatif.

6. Mendeskripsikan pola-pola (*patterns*) tertentu, yaitu untuk mendapatkan informasi dalam rangka menggambarkan pola-pola tertentu.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti akanmenfokuskan penelitian pada dua aspek utama yakni:

1. Upaya pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan, yang meliputi pencegahan dan penanganan kejahatan biasa dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).
2. Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan minat investasi, yang meliputi indikator motivasi dan indikator interaksi.

Merujuk kondisi wilayah di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Utara yang tingkat kriminalitasnya tinggi peneliti memfokuskan terkait dengan faktor keamanan yakni kejahatan biasa dan kejahatan kerah putih serta indikator motivasi dan indikator interaksi dalam pengembangan investasi. Menggambarkan peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta Kepolisian Resor Lampung Utara dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan, pada penelitian ini diharapkan memunculkan kebijakan strategis di bidang keamanan dan investasi.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek

yang teliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Tindakan yang harus dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori dan mempelajari lebih dalam mengenai fokus penelitian serta rumusan masalah penelitian, serta mempertimbangkan dari sisi geografis dan praktis baik dari segi pertimbangan waktu, biaya dan tenaga.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Utara, dengan sumber data utama meliputi: Kepolisian Resort Lampung Utara, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Badan Pusat Statistik, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **D. Jenis Data Penelitian**

Data yang diklasifikasikan maupun dianalisa untuk mempermudah dalam menghadapi pada pemecahan permasalahan, perolehannya bisa berasal dari masyarakat secara langsung maupun bahan-bahan kepustakaan. Pada penelitian ini data yang diperlukan adalah rasio tingkat kriminalitas dan besaran nilai investasi. Klasifikasi penelitian antara lain:

1. Data primer, yaitu Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan informan. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.

2. Data Sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data-data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.

#### **E. Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah aktor dan kelompok yang terkait langsung dengan tema penelitian. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan terhadap pengembangan investasi.

Secara umum sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari empat komponen, yaitu komponen birokrasi, komponen pengamanan, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Birokrasi adalah pelaksana kebijakan yang memiliki peran melayani maupun sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini birokrasi termasuk diantaranya instansi-instansi dinas.

Fungsi utama yang diukur dalam penelitian ini adalah fungsi kebijakan keamanan daerah serta pengaturan ekonomi daerah. Komponen pengamanan terdiri dari Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Utara, masyarakat

ekonomi terdiri dari kalangan investor dan pengusaha serta masyarakat sipil terdiri dari organisasi-organisasi, forum masyarakat dan media riset.

Dari empat komponen tersebut, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lampung Utara.
2. Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Investor, Pengusaha, pedagang, wirausahawan merupakan bagian yang mewakili masyarakat ekonomi. Pihak-pihak ini dianggap memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui perkembangan ekonomi di daerah.

**Tabel 7. Informan Penelitian**

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Keterangan (4)
1.	Drs. Sri Mulyana, MM	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
2.	Iptu. GM Saragi, S.Pd., MH	Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO)	Kepolisian Resor Kab. Lampung Utara
3.	Paswani Mega, SH	Kabid Penanganan Konflik dan WasNas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Firwanta	Kepala Personalia	PT. Teguh Wibawa Bhakti Husada
5.	Tiara	Manager	Hotel Duta Kotabumi
6.	M Mashuri	Supervisi	Telkomsel Kotabumi

*Sumber: Diolah peneliti*

Banyaknya informasi yang terkandung dalam suatu sampel yang diteliti sangat tergantung pada tingkat variasi (*heterogenitas*) dari populasi darimana sampel dipilih (Supranto, 2000:201).

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sarwono, 2006:224-225). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi faktual tentang suatu peristiwa, masalah atau kebijakan. Wawancara dilakukan hanya untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain, seperti laporan, dokumentasi pemerintahan dan sebagainya.

##### 2. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif tipe partisipasi aktif (*direct participation*). Dalam hal ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Seperti yang disebutkan oleh Maryann Barakso dkk (2014:196) terkait definisi pengamatan langsung adalah sebagai berikut :

*“The strength of direct observation is that it offers researchers a means to immerse themselves in a case and inductively learn about*

*their topic of study. Direct observation is therefore less useful in hypothesis testing and making causal inferences, and far more appropriate in making rich descriptive inferences, refining theories, and generating hypotheses.”*

Observasi langsung akan membuat peneliti berbaur didalam masalah yang sedang diteliti. Pengamatan langsung dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk menilai dan menghitung komponen-komponen tingkat keamanan dan nilai investasi di Kabupaten Lampung Utara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010:201).Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai perbendaharaan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rincian nilai investasi di Kabupaten Lampung Utara;
2. Dokumen Kepolisian Resor mengenai keamanan;
3. Zonasi wilayah berdasarkan investasi;
4. Berita-berita terkait dengan tema penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari awal pelaksanaan sebelum memasuki lapangan melalui analisis data hasil studi terdahulu maupun data sekunder lainnya hingga tahap penulisan hasil penelitian.

Namun analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015: 337) mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Namey dkk ( 2007: 137) mengatakan jika reduksi data merupakan bagian dari analisis dimana peneliti lebih mempertajam, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa agar kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti menyimpulkan bahwa reduksi data mengandung artian merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema serta pola dan membuang data yang tidak perlu. Saat mereduksi data, peneliti akan bertumpu pada tujuan yang akan dicapai.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah melakukan display data. Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

### 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal penelitian masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila pada tahap pengumpulan data tidak menemukan bukti yang kuat, hal itu dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada.

## H. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, trigulasi, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Moleong (2005: 24-337) memberikan penjelasan mengenai kriteria-kriteria sebagai berikut:

### 1. Derajat Kepercayaan

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan untuk menunjukkan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

## 2. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

## 3. Ketekunan

Ketekunan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

## 4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin dalam Moleong (2005:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan pengecekan dari berbagai sumber, yaitu dengan mewawancarai beberapa informan yang berasal dari kalangan yang berbeda. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait informasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non-

partisipan dan dokumentasi juga dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat.

#### 5. Keteralihan

Konsep validitas keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi. Data yang disajikan yakni selain wawancara juga berupa catatan-catatan lapangan, peraturan, dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan di hasil dan pembahasan.

#### 6. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non kualitatif. Kebergantungan dapat dicapai dengan cara memeriksa suatu kebenaran. Berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai semua data yang diperoleh, kemudian diadakan seminar untuk membahasnya.

#### 7. Kepastian

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektifitas menurut non kualitatif. Non kualitatif menetapkan objektifitas dari segi kesepakatan antar subjek. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang baru dapat dikatakan objektif. Kepastian pada penelitian kualitatif berupa penekanan pada data. Jika hasil penelitian ini layak dan memenuhi kriteria, maka hasil penelitian ini dapat digantungkan pada peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab sebelumnya peneliti telah menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada bab ini peneliti pertama-tama akan memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Lampung Utara dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan penelitian ini, diantaranya: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Utara.

##### **A. Kabupaten Lampung Utara**

###### **1. Sejarah Kabupaten Lampung Utara**

Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga. Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan

di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan.

Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965. Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, Terbentuklah Kabupaten Lampung Utara dibawah Provinsi Sumatera Selatan. Terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km<sup>2</sup> kini tinggal 2.765,63 km<sup>2</sup>. Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara

kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu : Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.



Gambar 4. Logo Kabupaten Lampung Utara  
*Sumber: Kotabumi-lampura.blogspot.com*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Maripat
2. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop
3. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan
4. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka
5. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun
6. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan
7. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan

Sehingga saat ini di Kabupaten Lampung Utara terdapat 23 kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Abung Barat
2. Kecamatan Abung Kunang
3. Kecamatan Abung Pekurun
4. Kecamatan Abung Selatan
5. Kecamatan Abung Semuli
6. Kecamatan Abung Surakarta
7. Kecamatan Abung Tengah
8. Kecamatan Abung Timur
9. Kecamatan Abung Tinggi
10. Kecamatan Blambangan Pagar
11. Kecamatan Bukit Kemuning

12. Kecamatan Bunga Mayang
13. Kecamatan Hulu Sungkai
14. Kecamatan Kotabumi Kota
15. Kecamatan Kotabumi Utara
16. Kecamatan Kotabumi Selatan
17. Kecamatan Muara Sungkai
18. Kecamatan Sungkai Barat
19. Kecamatan Sungkai Jaya
20. Kecamatan Sungkai Selatan
21. Kecamatan Sungkai Tengah
22. Kecamatan Sungkai Utara
23. Kecamatan Tanjung Raja

## **2. Lokasi dan Luas Wilayah**

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Lampung Utara terletak diantara 4,340-5,060 Lintang Selatan dan 104,30-105,80 Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.725,63 km<sup>2</sup>, yang merupakan 7,72% dari luas wilayah Provinsi Lampung (35.288,35 km<sup>2</sup>). Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Utara meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Waykanan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pada tahun 1999 Kabupaten Lampung Utara mengalami pemekaran dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Lampung Utara kembali berkurang 6 (enam) Kecamatan yaitu: Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Pekuon Ratu, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit dan Kecamatan Kasui, sehingga Kabupaten Lampung Utara tinggal 8 (delapan) Kecamatan yaitu : Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Bukit Kemuning. Pemekaran ini mengakibatkan luas wilayah Kabupaten Lampung Utara hanya 2.725,63 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Lampung Utara beribukota di Kotabumi, berjarak 100 km dari Bandar Lampung (Ibukota Propinsi Lampung). Masyarakat Lampung Utara dikenal sebagai masyarakat yang terbuka bagi kaum pendatang dan memiliki jiwa gotong royong (“SAKAI SEMBAYA”). Iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau sepanjang tahun, temperature rata-rata 30° C, dengan jumlah hujan 197mm/bulan dan dari hujan rata-rata 12hari/bulan. Perekonomian Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh sektor pertanian. Penduduk bermata pencaharian utama pada sektor pertanian, khususnya pertanian sektor tanaman keras.

### 3. Potensi Sumber Daya Alam

#### 3.1 Daerah aliran sungai

Dari aspek Hidrologi, Kabupaten Lampung Utara dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS ), yaitu Daerah Aliran Sungai ( DAS )Tulang Bawang seluas 217.376, 334 Hektar, terdiri dari Sub DAS Way Rarem, Sub DAS Way Abung Dan Sub DAS Way Besai serta Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Seputih seluas 57.073, 621 Hektar, sehingga menyebabkan Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan, yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian, antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi,budidaya perikanan air tawar, sarana penyediaan air bersih, serta sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, baik secara konvensional maupun inkonvensional, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa sungai dan anak sungai yang termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS ) Way Tulang Bawang serta Daerah Aliran Sungai (DAS ) Way Seputih, sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

**Tabel 8. Sungai dan anak sungai di Kab Lampung Utara**

No. (1)	Nama Sungai (2)	Panjang (Km) (3)	Daerah Alir (Km <sup>2</sup> ) (4)
1.	Way Rarem	42	193
2.	Way Galing	27	131,5
3.	Way Kulur	26	137

No. (1)	Nama Sungai (2)	Panjang (Km) (3)	Daerah Alir (Km <sup>2</sup> ) (4)
4.	Way Sabuk	38	108
5.	Way Kelam	32	158
6.	Way Renauh	30	156
7.	Way Tulung Mas	57	134
8.	Way Melungun	45	133
9.	Way Belanga	22	76
10.	Way Hulu Sungkai	38	116
11.	Way Buluh	25	64
12.	Way Buyut	33	124
13.	Way Hanakau	29	59,5
14.	Way Sungkai Hilir	25	80
15.	Way Papan	33	208
16	Way Pengubuan	25	80
	<b>Jumlah</b>	<b>527</b>	<b>1958</b>

*Sumber: BPS Kab Lampung Utara*

### 3.2 Kawasan Budi Daya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya. bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Lampung Utara, lingkungan wilayah perencanaan, menciptakan lapangan kerja, terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dimana pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hutan Produksi tetap (HP) yang hingga saat ini, masih menunggu keputusan tata batas dengan wilayah Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus Tahun 2000, Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau (No register 46), ditetapkan sebagai Hutan Produksi (HP) seluas 177 Ha (0,06% dari luas wilayah hutan register 46), luas hutan tersebut termasuk ke dalam wilayah administratif bagian Utara Kabupaten Lampung Utara, yaitu Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Sungkai Utara.

Sedangkan totalitas hutan produksi yang dimiliki seluas 177 Hektar, dengan rincian 127,44 Hektar berada di wilayah kecamatan Sungkai Utara dan seluas 49,56 Hektar berada di wilayah kecamatan Bunga Mayang. Akan tetapi luasan Kawasan Hutan Produksi Way Hanakau (No register 46), sebesar 177 Ha (0,06% dari luas wilayah hutan register 46), yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, masih menunggu kepastian proses penyelesaian penetapan tapal batas wilayah administratif antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan.

### **3.3 Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian, yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunandan Peternakan yang secara rinci sebagai berikut:

**3.3.1 Kawasan pertanian tanaman pangan**, meliputi Kawasan Budidaya tanaman pangan dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan Budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 64.915 (enam puluh empat ribu sembilan lima belas) yang tersebar di 12 kecamatan: Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Tanjung Raja, dan Kecamatan Kotabumi Utara.

**3.3.2 Kawasan hortikultura**, dengan luas kurang lebih 974087 Ha yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan meliputi Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Tanjung Raja, dan Kecamatan Abung Pekurun.

**3.3.3 Kawasan perkebunan**, dengan luas kurang lebih 128.563 (seratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar, yang tersebar 19 (sembilan belas) Kecamatan meliputi: Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Hulu Sungkai, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Abung Tinggi, dan Kecamatan Abung Kunang.

**3.3.4 Kawasan budi daya peternakan**, terdiri dari:

- Kawasan budidaya ternak besar, meliputi ternak sapi dan kerbau yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Blambangan Pagar, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Bukit Kemuning.

- Kawasan Budidaya ternak kecil, meliputi ternak kambing dan domba yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Abung Kunang, Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Bukit Kemuning.
- Kawasan Budidaya ternak unggas, meliputi ternak ayam ras, ayam buras, bebek dan itik yang tersebar di 23 Kecamatan dan khusus pengembangan ayam ras di kecamatan Kotabumi Utara dan kecamatan Abung Semuli. Untuk mendukung operasional kawasan budidaya
- Peternakan disediakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Kalicinta kecamatan Kotabumi Utara dengan komoditas sapi dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) di wilayah Sungkai Jaya, Abung Selatan dan Abung Tinggi.

### 3.4 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi Kawasan perikanan budidaya, Kawasan Minapolitan dan Prasarana perikanan yang secara rinci sebagai berikut:

- Kawasan perikanan budidaya dengan komoditas unggulan berupa ikan mas, nila, gurami, patin dan ikan lele yang berlokasi di bendungan Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun, bendungan Tirtha Sinta di Kecamatan Kotabumi Utara dan bendungan Way Tebabeng di Kecamatan Abung Selatan.
- Kawasan minapolitan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan Lele, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Abung Pekurun.
- Untuk mendukung operasional kawasan budidaya Perikanan dan kawasan minapolitan disediakan Prasarana perikanan berupa Balai Benih Ikan (BBI) dengan benih ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Patin dan Ikan Lele berada di Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Semuli dan Kecamatan Abung Tinggi dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) berada di Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Kotabumi Selatan dan Kecamatan Abung Tinggi.

### 3.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi wilayah usaha pertambangan mineral batu bara dan wilayah usaha pertambangan mineral non-logam berupa pasir dan batuan yang secara rinci sebagai berikut:

- Wilayah usaha pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Abung Pekurun;
- Wilayah usaha pertambangan mineral non-logam berupa pasir dan batuan meliputi:
  - Usaha Pertambangan Pasir tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Selatan dan Kecamatan Sungkai Utara.
  - Usaha Pertambangan Batuan tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Jaya dan Kecamatan Abung Pekurun.

### 3.6 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi wilayah industri besar; dan industri rumah tangga yang secara rinci sebagai berikut:

- Kawasan Industri besar merupakan industri pengolahan berbasis agro yang tersebar di 5 ( lima ) Kecamatan yaitu Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Utara dan Kecamatan Sungkai Selatan.
- Kawasan Industri rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Lampung Utara.

### 3.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata buatanang secara rinci sebagai berikut:

- Kawasan wisata alam terdiri dari wisata Air Terjun Indah Kelawas di Kecamatan Abung Tengah, Air Terjun Curup Slampung di Kecamatan Sungkai Barat, Air Terjun Curup Paten di Kecamatan Bukit Kemuning, Wisata agro di Way Rarem dan Ekowisata di Kecamatan Abung Pekurun.
- Kawasan Wisata budaya terdiri dari wisata Kampung Tua di Kecamatan Kotabumi, Kawasan Makam Minak Triodeso yang terletak di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi, Kawasan Makam Semelasem yang terletak di Desa Kalicinta Kecamatan

Kotabumi Utara dan Sanggar-Sanggar seni/budaya di Kecamatan Kotabumi dan Kecamatan Abung Timur.

- Kawasan Wisata buatan terdapat di lokasi Bendungan Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun, Bendungan Way Tulung Mas di Kecamatan Sungkai Jaya, Bendungan Way Tebabeng di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagardan Bendungan Tirta Sinta di Desa Wonomerto Kecamatan Kotabumi Utara.

## **B. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

### **1. Gambaran Umum DPMPTSP**

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Utara yang berperan dalam pelaksanaan perkembangan Kabupaten Lampung Utara ini terutama di sektor perizinan dan penanaman modal. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lampung Utara memiliki dua tugas pokok yaitu Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun filosofi yang dibangun adalah bagaimana memberikan pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan diharapkan akan mendorong investasi di daerah. Investasi yang meningkat akan mendorong

terciptanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, akhirnya meningkatkan perekonomian daerah dan menjadikan Kabupaten Lampung Utara yang maju dan berkembang. Dengan motto "Uruslah izin anda tanpa melalui perantara". Bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain berupa :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi
3. Program peningkatan kualitas pelayanan
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara khususnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan telah berusaha semaksimal mungkin mendukung program pemerintah kabupaten dalam menarik modal swasta, namun demikian minat investasi masuk masih relatif kecil. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh faktor internal. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan penanaman modal di kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan, perlu dilakukan suatu kajian yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan penanaman modal di Kabupaten Lampung Utara.

## **2. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Pembuatan peta penanaman modal daerah;
- f. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- g. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan proses pelayanan perizinan;
- i. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan
- j. Penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub bagian perencanaan
  - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - c. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
3. Bidang perencanaan promosi penanaman modal
  - b. Seksi promosi dan penanaman modal
  - c. Seksi perencanaan investasi penanaman modal
4. Bidang perizinan ekonomi pembangunan
  - a. Seksi usaha
  - b. Seksi bangunan komersil
5. Bidang perizinan perumahan rakyat dan kesejahteraan sosial
  - a. Seksi perumahan rakyat
  - b. Seksi kesra
6. Bidang pengawasan, pengendalian data, regulasi dan pelaporan
  - a. Seksi pengendalian
  - b. Seksi data, regulasi dan pelaporan
7. Jabatan fungsional

Uraian tugas untuk tiap struktur sebagai berikut:

1. Kepala dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi, mengordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- d. Melaksanakan koordinasi prose Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengatur pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga serta membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, pengelolaan administrasi dan sumber daya melakukan kerjasama dengan dinas instansi terkait;

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi;

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. Menyelenggarakan urusan umum dan ketatausahaan, urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kerja, koordinasi dan hubungan antara dinas instansi dan penyiapan rapat-rapat dinas;

- c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan perlengkapan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi:

1.) Sub bagian perencanaan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta mengordinasikan penyusunan program dan kegiatan. Dengan melaksanakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas tahunan;
- b. Pengkoordinasian rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan program kerja Dinas;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan RENSTRA, RENJA, KUA, PPAS, LPPD; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum perkantoran, administrasi kepegawaian dan analisis jabatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan surat menyurat dan menyiapkan rapat-rapat dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan kepegawaian, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan masyarakat;
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan kantor;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.) Sub bagian keuangan dan perlengkapan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pengurusan administrasi gaji, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas serta pelaksanaan pada Sub bagian keuangan;
- b. Pelaksanaan administrasi gaji pegawai;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelola keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan kebutuhan perlengkapan Dinas dengan para Kepala Bidang;

- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan bendahara pengeluaran dan pelaksanaan penyiapan SPM;
  - h. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - i. Penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan serta keabsahan SPJ pengeluaran;
  - j. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan atas transaksi keuangan, barang, hutang dan ekuitas dana;
  - k. Penyampaian laporan keuangan dan barang yang meliputi realisasi anggaran, neraca keuangan dan barang;
  - l. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas keuangan dan perlengkapan; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang perencanaan dan promosi penanaman modal
- Bidang penanaman modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Penanaman Modal meliputi pengkajian, pengembangan, pengendalian promosi dan investasi. Untuk menyelenggarakan tugas bidang perencanaan dan promosi penanaman modal mempunyai fungsi:
- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi atau kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
  - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memperdayakan badan usaha melalui penanaman modal;

- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan atau strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana, dan prasarana promosi penanaman modal.

Bidang perencanaan dan promosi penanaman modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang perencanaan dan promosi penanaman modal, membawahi: seksi perencanaan investasi penanaman modal dan seksi promosi penanaman modal.

#### 4. Bidang perizinan ekonomi pembangunan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pemerosesan dan penerbitan perizinan usaha komersil. Bidang perizinan ekonomi pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan usaha;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan bangunan komersil. Bidang perizinan ekonomi pembangunan, membawahi: seksi usaha dan seksi bangunan komersil.

5. Bidang perizinan perumahan rakyat dan kesejahteraan sosial

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi pendaftaran, pemerosesan dan penerbitan perizinan bangunan rumah tangga bidang kesehatan dan bangunan sosial. Bidang perizinan perumahan rakyat dan kesejahteraan sosial, mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, menkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan bangunan rumah tinggal.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan bidang kesehatan dan bangunan sosial

Bidang perizinan perumahan rakyat dan kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas serta membawahi: seksi perumahan rakyat dan seksi kesejahteraan rakyat.

6. Bidang pengawasan, pengendalian, data, regulasi dan pelaporan

Untuk melaksanakan tugas bidang pengawasan, pengendalian, data, regulasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal;

- c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - f. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  - g. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - h. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisa, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi, dan pemberian advokasi layanan, serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- Bidang pengawasan, pengendalian, data, regulasi, dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas serta membawahi: seksi pengendalian dan seksi data, regulasi dan pelaporan,

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan bekerjasama dengan Kepolisian Resor melalui pinjam pakai aset daerah yang bertujuan untuk menunjang kinerja kepolisian, pembentukan Tim Saber Pungli, penambahan pos-pos kepolisian serta pengenalan jaminan keamanan.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pengembangan investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dilakukan dengan memberikan keringanan pajak, mempermudah proses perizinan serta mengedepankan pengurusan perizinan yang bebas dari praktek korupsi.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya sudah memiliki pondasi awal guna membuat kebijakan strategis di bidang keamanan dalam Visi-Misi dan Program Bupati yang tertuang dalam

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2019 Kabupaten Lampung Utara. Dengan Misi “Mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara”, dan tertuang dalam beberapa program.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi dan kerjasama keamanan dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, TNI, Pol PP dan organisasi masyarakat serta penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di desa-desa.
2. Pemerintah daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan perlu meningkatkan promosi mengenai jaminan keamanan dan potensi investasi melalui pemasangan *billboard-billboard* di jalan-jalan utama dan situs-situs resmi pemerintah daerah.
3. Perlu ditingkatkannya peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai permasalahan faktual di daerah yang di sinergikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga diharapkan dapat memunculkan kebijakan strategis terutama bidang keamanan yang berkaitan dengan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Ardalan, Abol. 2000. *Economic and Financial Analysis*. Technomic Publishing Company. Pennsylvania.
- Arifin, Bustanul dan Didik, J Rachbini. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Grasindo. Jakarta.
- Buzan, Barry dkk.1998. *Hanbook:Security a New Framework For Analysis*. Lynne Rienner Publishing Inc. Colorado.
- Danandjaja. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Dernburg, Thomas F. 1985. *Macroeconomics: Concepts, Theories and Policies*. Mc Graw-Hill Ink. New York.
- Hadi, Noor. 2011. *Corporate Social Responbility*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Harjono, Dhaniswara K. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herrick, Bruce and Charles, P Kindleberger. 1983. *Economic Development*. Mc Graw Hill Inc. New York.
- Ikhsan, Sonny M. 2012. *Pengaruh Keamanan, Kesadaran Masyarakat, Pungutan Liar, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam terhadap PAD Bireuen*. Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Vol.III No. 5. Universitas Almuslim Aceh.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Johan, Suwinto. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kresna, Aryaning Arya, Walukow, Devi Stany Dan Riyanto. 2010. *Etika Dan Tertib Hidup Berwarga Negara*. Salemba Humanika, Jakarta.

- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Marsuki. 2005. *Analisis Perekonomian Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Murphy, Antoin E. 2011. *The Genesis of Macroeconomic*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Nugroho. 2008. *Evaluasi Terhadap faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya*. Riptek Vol. 2 No. 1. Universitas Diponegoro.
- Putra, Nusa. 2011. *Research & Development Penelitian dan Pengembangan Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simadjuntak, B. 1997. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung.
- Soebandriyo dkk. 2012. *Kelayakan Potensi Daerah dalam Mendukung Pengembangan Investasi di Jawa Tengah*. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Vol.10 No.1. UNDIP Semarang.
- Sofyan, Iban. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sopandi, Andi dan Nandang, Nazmulmunir. 2012. *Pengembangan Iklim Investasi Daerah*. Jurnal Kybernan Vol. 3 No. 1. Kybernan.
- Subagyo, P Joko. 2011. *Meode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Asdi Mahasatya. Jakarta.
- Supranto, J dan Nandan, Limakrisna. 2012. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Supranto, J. 2000. *Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suwarno. 2008. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing pada Industri Manufaktur di Jawa Timur*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1. Fakultas Ekonomi UPN.
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas-Asas Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wirawan. 2009. *Konflik Dan Manajemen Konflik*. Salemba Humanika, Jakarta..

Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal:

Soares, Armando dkk. 2015. Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal

Eleanora, Fransiska Novita. 2013. *White Collar Crime* dan Masyarakat. Jurnal

Sbm, Nugroho. 2008. Evaluasi terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya. Jurnal

Zaenuddin, Muhammad. 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam. Jurnal